



**Pemerintah Kota Dumai  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

**Sub Bidang Pembiayaan**

Nomor SOP	143 /SOP/BAPPEDA
Tanggal Pembuatan	26 Desember 2018
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	Desember 2018
Disahkan Oleh	 Kepala Bappeda Kota Dumai <b>MURAMMIAD SYAFIE, S.Sos, M.Si</b> NIP. 196507221999031002
Judul SOP	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai

**Dasar Hukum**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2)

Peraturan Presiden nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai Tahun 2005-2025

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Dumai

**Kualifikasi Pelaksana**

Memiliki kewenangan dalam penyusunan RKPD







Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan perundang-undangan yang terkait;</li> <li>2. Kebijakan pemerintah yang terkait;</li> <li>3. RKPD provinsi, RPJPD kota, RPJMD kota, RTRW kota, Renstra Perangkat Daerah;</li> <li>4. Hasil evaluasi RKPD periode lalu;</li> <li>5. Data statistik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir;</li> <li>6. Perangkat Komputer.</li> </ol>
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<p>Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan RKPD ini tidak akan berjalan lancar.</p>	<p>Indikator kinerja, target, realisasi, dan persentase capaian kinerja</p>

### TAHAPAN PENYUSUNAN RKPD KOTA DUMAI TAHUN 2020

No.	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			
		Gubernur	DPRD	Walikota	Sekretaris Daerah	Bappeda	Perangkat Daerah	Stakeholder	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Persiapan Penyusunan											
	- Penyusunan Rancangan SK Wako Tim Penyusunan RKPD			■					Draft SK Tim	Desember 2018	SK Tim	Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 73
	- orientasi mengenai RKPD;					■			Undangan, Tempat, daftar hadir	Desember 2018	Penyamaan persepsi	Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 73
	- penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD					■			Draft Jadwal	Desember 2018	Jadwal	Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 73
	- penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD					■			Data SIPD terbaru, draft surat permintaan Data pendukung lainnya	Desember 2018	Update Data SIPD, Surat permintaan Data pendukung lainnya	Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 73
2	Penyusunan Ranwal RKPD					■			RPJMD Kota Dumai, rancangan awal RKPD provinsi Riau, Rencana Kerja Pemerintah, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD	Desember 2018	Dokumen Rancangan Awal RKPD	Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 74,75,77, 79; berpedoman pada RPJMD kabupaten/kota, rancangan awal RKPD provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD
	- DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat		■						pokok-pokok pikiran DPRD, Sistem e-planning	Desember-februari 2018	Hasil inputan pokok-pokok pikiran DPRD di dalam Sistem e-planning	Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 78, 178; DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD disampaikan tertulis ke Bappeda, disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan, dimasukkan kedalam e-planning bagi Daerah yang telah memiliki SIPD, Pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya

No.	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			
		Gubernur	DPRD	Walikota	Sekretaris Daerah	Bappeda	Perangkat Daerah	Stakeholder	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
	- forum konsultasi publik								Undangan, Tempat, daftar hadir, nara sumber.	Januari 2019	Berita Acara Kesepakatan	Permendagri 86 Tahun 2018 Pasal 80; dibahas bersama dengan kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan. dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala BAPPEDA dan kepala Perangkat Daerah serta perwakilan masyarakat yang hadir pada konsultasi publik
	- Penyempurnaan rancangan awal RKPD								berita acara kesepakatan konsultasi publik	Januari 2019	Hasil Penyempurnaan Dokumen Rancangan Awal RKPD	Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 81; BAPPEDA menyempurnakan rancangan awal RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan konsultasi publik
	- Pengajuan rancangan awal RKPD kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah								konsep surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah, rancangan awal RKPD	Januari 2019	surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah	Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 82; BAPPEDA mengajukan rancangan awal RKPD kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah.
	- Penyampaian surat edaran Kepala Daerah kepada kepala Perangkat Daerah								asaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan Perangkat Daerah disertai indikator dan target kinerja serta pagu indikatif	Januari 2019, paling lambat minggu II feb	Surat edaran	Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 83; Surat edaran memuat agenda penyusunan RKPD, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, Musrenbang RKPD, dan batas waktu penyampaian rancangan awal Renja Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi
	- Penyampaian Surat Kepala Bappeda Kota Dumai kepada Camat								draft Surat Kepala Bappeda Kota Dumai kepada Camat Perihal Panduan Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan, draft Surat Kepala Bappeda Kota Dumai kepada Camat Perihal Permintaan Jadwal Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan Tahun 2019	Januari 2019	Jadwal Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan Tahun 2019	Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 83
3	Penyusunan Rancangan RKPD								rancangan awal Renja, rancangan RKPD provinsi, RKP dan program strategis nasional	Februari - minggu I April 2019	Hasil penyempurnaan rancangan awal RKPD Kota Dumai	Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 88; proses penyempurnaan rancangan awal RKPD kabupaten/kota berdasarkan rancangan awal Renja yang telah di verifikasi Bappeda dan hasil penelaahan terhadap rancangan RKPD provinsi, RKP dan program strategis nasional

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku				
		Gubernur	DPRD	Walikota	Sekretaris Daerah	Bappeda	Perangkat Daerah	Stakeholder	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
	- Pengajuan rancangan awal RKPD								Hasil penyempurnaan rancangan awal RKPD Kota Dumai, draft surat pengajuan rancangan RKPD		Disposisi Surat	Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 89; BAPPEDA kabupaten/kota mengajukan rancangan RKPD kabupaten/kota kepada bupati/wali kota melalui Sekretaris Daerah dalam rangka memperoleh persetujuan terkait : rancangan RKPD kabupaten/kota dan pelaksanaan Musrenbang RKPD kabupaten/kota
4	Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten/kota								Undangan, Tempat, daftar hadir	PL Minggu II Jan	Berita Acara, Daftar Usulan dan Isian hasil rembuk RT	Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 83; Pelaksanaan Rembuk RT
	- Musrenbang RKPD Kota di Kelurahan								Undangan, Tempat, daftar hadir, nara sumber, Berita Acara, Daftar Usulan dan Isian hasil rembuk RT	PL Minggu IV jan	Berita Acara, Daftar Usulan dan Isian hasil musrenbang Kelurahan	Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 83, 98; Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan, Tata cara pengajuan daftar usulan desa/kelurahan berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai pedoman pembangunan desa.
	- Musrenbang RKPD Kota di Kecamatan								Undangan, Tempat, daftar hadir, narasumber, Berita Acara, Daftar Usulan dan Isian hasil musrenbang Kelurahan	PL Minggu II Februari 2019	Berita Acara, Daftar Usulan dan Isian hasil musrenbang Kecamatan	Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 83, pasal 94, 98; Musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan, forum pembahasan hasil daftar usulan desa/kelurahan di lingkup kecamatan bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Daerah di wilayah kecamatan (BA, Daftar Usulan dan Isian bahan untuk musrenbang RKPD kota)
	- Forum Perangkat Daerah								Undangan, Tempat, daftar hadir, nara sumber.	PL Minggu II Maret	Berita Acara Forum Perangkat Daerah	Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 84; Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dibahas dengan pemangku kepentingan dalam forum Perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan penyempurnaan untuk kemudian di verifikasi Bappeda
	- Musrenbang RKPD Kota								Undangan, Tempat, daftar hadir, nara sumber, Berita Acara, Daftar Usulan dan Isian hasil musrenbang Kecamatan	PL minggu IV Maret 2019	Berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD kota	Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 89, pasal 94; Musrenbang RKPD kabupaten/kota
5	Perumusan Rancangan Akhir RKPD								Berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD kota	PL Minggu I April	Draft Dokumen Rancangan Akhir RKPD	Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 100; merupakan proses penyempurnaan rancangan RKPD kabupaten/kota menjadi rancangan akhir RKPD kabupaten/kota berdasarkan berita

No.	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			
		Gubernur	DPRD	Walikota	Sekretaris Daerah	Bappeda	Perangkat Daerah	Stakeholder	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
	- Penyempurnaan Rancangan akhir								Draft Surat, Draft Dokumen Rancangan Akhir RKPD	PL Minggu I April	Disposisi Surat, Dokumen Rancangan Akhir RKPD, program dan kegiatan Perangkat Daerah telah diakomodir dalam rancangan akhir RKPD	Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 101; disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas oleh seluruh kepala Perangkat Daerah bertujuan untuk memastikan program dan kegiatan Perangkat Daerah telah diakomodir dalam rancangan akhir RKPD.
	- Penyelesaian Rancangan Akhir								Draft Dokumen Rancangan Akhir RKPD	PL minggu IV Mei	Dokumen Rancangan Akhir RKPD	Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 101; Rancangan akhir diselesaikan paling lambat pada akhir bulan Mei
	- Penyampaian rancangan Perkada tentang RKPD kepada gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi untuk difasilitasi								Surat Permohonan Fasilitasi, rancangan akhir RKPD, berita acara kesepakatan Musrenbang RKPD, hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan, gambaran konsistensi program dan kerangka pendanaan antara RPJMD dan RKPD	PL Minggu IV Mei	Fasilitasi Gubernur melalui kepala Bappeda Provinsi terhadap Perkada tentang RKPD Kota Dumai	Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 102; bupati/wali kota menyampaikan rancangan Perkada tentang RKPD gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi untuk difasilitasi, Hasil fasilitasi disampaikan dalam bentuk surat Walikota melalui kepala BAPPEDA provinsi sebagai bahan penyempurnaan rancangan Perkada tentang RKPD kabupaten/kota
6	Penetapan RKPD								Hasil Fasilitasi Rancangan Perkada tentang RKPD	PL Bulan Juni	Rancangan Perkada tentang RKPD yang telah disempurnakan	Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 103; Rancangan Perkada tentang RKPD yang telah disempurnakan disampaikan oleh kepala BAPPEDA kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk persetujuan untuk penetapan dan pengundangan, disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan fasilitasi rancangan Perkada tentang RKPD
	- Penetapan Perwako tentang RKPD Kota								Konsep Peraturan Wali Kota tentang RKPD kota	PL Bulan Juni	Peraturan Wali Kota tentang RKPD kota	Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 104; Bupati/wali kota menetapkan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang RKPD kabupaten/kota paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan
	- Penyampaian Peraturan Wali Kota tentang RKPD kota dan hasil penilaian konsistensi program antara RKPD dengan RPJMD tahun berkenaan kepada gubernur melalui BAPPEDA provinsi								Peraturan Wali Kota tentang RKPD kota dan hasil penilaian konsistensi program antara RKPD dengan RPJMD tahun berkenaan kepada gubernur melalui BAPPEDA provinsi	PL Bulan Juni	Penyampaian RKPD kabupaten/kota Tahun 2020, digunakan sebagai bahan evaluasi penyusunan Rancangan KUA dan PPAS dan bahan sinkronisasi penyusunan rancangan peraturan daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2020	Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 107; Bupati/wali kota menyampaikan Peraturan Bupati/ Wali Kota tentang RKPD kabupaten/kota dan hasil penilaian konsistensi program antara RKPD dengan RPJMD tahun berkenaan kepada gubernur melalui BAPPEDA provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.